



Website: <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar>

DOI: <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i1.4376>

P-ISSN: [2685-1547](#) | E-ISSN: [2685-1555](#)

Metode Penafsiran Sayyid Qutb dalam Kitab Tafsirnya tentang Dimensi Politik

Amdahurifky B^{1*}, Ahmad Thib Raya², Muhammad Suaib Tahir³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam YDI Lubuk Sikaping Pasaman, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

³Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

Email: rifky31@gmail.com, thibraya@yahoo.co.id, stahir@ptiq.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 2022-10-02	Revised: 2022-20-02	Accepted: 2022-12-06	Published: 2022-09-24
-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract: The discourse on the interpretation of the Qur'an related to politics still leaves polemics, especially for intellectuals and academics. The pros and cons of the paradigm still occur whether or not politics or a government system are part of Islam and the Qur'an, and have even entered the realm of their respective discourses. This study will explain an alternative paradigm in explaining the political dimension according to the analysis of Sayyid Qutb's method in his commentary book *Fi Zhiḷāl al-Qur'an* based on the perspective of the Madaniyyah verses. This research uses a qualitative approach in the form of a literature review. The method used is the method of interpretation of *al-maudhū'i* (theme) by including the explanation through a scientific political approach. The big conclusion that can be drawn from this research is that the basic principles of the Qur'an become the applicable basis for political aspects that put forward substantive values and drive universal humanist passions. The term is also referred to as the humanist substantive expression of *harakī rabbanī*. The operational steps are described in the analytical model of Sayyid Qutb's method in his interpretation of the political dimension, especially with regard to the Madaniyyah verses. The correlation elements are taken based on aspects of political science which became an agreement between political scientists in April 1952 in Cambridge (England).

Keywords: Political Dimension; Sayyid Qutb; *Fi Zhiḷāl al-Qur'an*.

Abstrak: Wacana penafsiran al-Qur'an terkait politik masih menyisakan polemik terutama bagi para intelektual dan kalangan akademisi. Pro dan kontra paradigma masih terjadi apakah politik atau suatu sistem pemerintahan menjadi bagian atau tidak dari Islam dan al-Qur'an, bahkan sudah masuk ke ranah diskursus masing-masing. Penelitian ini akan menjelaskan paradigma alternatif dalam menjelaskan dimensi politik menurut analisis metode penafsiran Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya *Fi Zilāl al-Qur'an*. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam jenis kajian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah metode penafsiran *al-maudū'i* (tema) dengan mengikutsertakan penjelasannya melalui pendekatan politik secara keilmuan. Kesimpulan besar yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip dasar al-Qur'an menjadi dasar aplikatif bagi aspek-aspek politik yang mengedepankan nilai-nilai substantif dan menggerakkan gairah-gairah kebaikan humanis yang universal. Istilahnya disebut juga dengan ungkapan *harakī rabbanī* yang substantif secara humanis. Langkah-langkah operasionalnya terdiskripsikan pada model analisis metode Sayyid Qutb di dalam penafsirannya terkait dimensi politik. Unsur-unsur korelasinya diambil berdasarkan aspek keilmuan politik yang menjadi kesepakatan ilmun-ilmuan politik pada bulan April tahun 1952 di Cambridge (Inggris).

Kata Kunci: Dimensi Politik, Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'an*.

PENDAHULUAN

Fungsi al-Qur'an sebagai petunjuk universal sangat terbuka untuk diinterpretasikan dari berbagai aspeknya¹, termasuk yang berkaitan dengan dimensi politik. Namun, faktanya diskursus ini teridentikkan secara negatif, maka secara tidak langsung paradigma ini sedikit banyaknya bisa mereduksi pancaran petunjuk dan kemuliaan al-Qur'an itu sendiri. Indikator ini teridentifikasi sewaktu pemaknaan al-Qur'an dinarasikan seolah-olah tidak relevan jika dikaitkan dengan problematika politik atau *siyāsī*. Contohnya, sekularisme² dan politisasi ayat yang juga masih terjadi. Munculnya fenomena dan problematika di atas terkuatkan dan mendapat dukungan dengan hadirnya argumentasi 'Alī 'Abd al-Rāziq tentang sistem pemerintahan Islam yang dilandaskannya pada ayat Madaniyyah di surat an-Nisā [4] ayat 80, dimana 'Alī 'Abd al-Rāziq berkomentar bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan tugas dan fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai pemelihara, pelindung, penjaga, pemaksa, dan pengatur umatnya serta sebagai raja atau kepala pemerintahan. Fungsi Nabi dalam pandangan 'Alī 'Abd al-Rāziq terkait dari ayat tersebut hanyalah sebagai utusan Allah SWT dan pembawa misi risalah saja³.

Suatu isyarat yang pasti bahwa berbagai kasus dan paham yang berhubungan dengan interpretasi ajaran Islam dan al-Qur'an mengenai dimensi politik dan sistem pemerintahan yang dapat merusak citra kemuliaan ayat-ayat al-Qur'an, ternyata mendapat komentar yang kontra serta penolakan yang cukup tinggi dari sebagian besar para tokoh, ahli, pemikir, cendekiawan serta ulama. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah seperti Muḥammad 'Abduh (L.1849 M/1244 H), Maḥmūd Syaltūt (1893-1963M), Yūsuf al-Qardhāwī, Rasyīd Riḍā (1865-1935), al-Maudūdī (1903-1979), Sayyid Quṭb dan M Quraish Shihab⁴.

Salah satu tokoh yang sangat menonjol dalam mengkritik pemahaman seperti ini adalah Sayyid Quṭb. Ia berusaha secara optimal dalam mengkomunikasikan pandangannya ini walaupun dengan konsekuensi harus dipenjara. Pada kenyataannya diluar dugaan di dalam penjara tersebutlah ia mampu menyelesaikan hasil karyanya yang fenomenal tersebut yaitu kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*⁵. Pandangan dan karya tafsirnya ini menunjukkan suatu isyarat bahwa ada suatu nilai khusus yang bisa diambil dari segi politik dan pemerintahan. Selain itu juga, tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan hidupnya sangat bersinggungan dengan kekuasaan dan pemerintahan waktu itu. Sehingga alur penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an sedikit banyaknya memiliki ketersinggungan dan korelasi yang khusus dengan persoalan tersebut⁶.

Berdasarkan narasi ini maka pembahasan selanjutnya akan terfokus kepada suatu diskripsi tentang analisis metode yang digunakan dalam penafsiran Sayyid Quṭb di dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur'an* untuk mengungkap dimensi politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*). Sumber data primernya adalah kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quṭb. Sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari karangan Sayyid Quṭb lainnya, seperti *Ma'ālīm fī al-Ṭarīq* serta buku-buku yang berbicara tentang pemikiran yang berkaitan dengan paradigma Sayyid Quṭb dan jurnal-jurnal yang terkait dengan pemikiran Sayyid Quṭb. Jika lebih dispesifikasikan terkait dengan ayat-ayat yang menjadi objek analisis metodenya adalah terkhusus yang masuk pada kategori ayat-ayat madaniyyah.

¹Ahmad Syukron, *Penafsiran Politik Sayid Quthb (Studi Atas Tafsir al-Adabi al-Harakī dalam Fī Zhilāl al-Qur'ān dan Respon Ulama)* (Ciputat: Cinta Buku Media, 2017), hal. 1.

²Luthfi Assyaukanie, *Islam and the Secular State in Indonesia* (Singapura: Institute Of Southeast Asian Studies, 2009), hal. 12-18.

³Muhammad Iqbal dan Nasution Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 112-119.

⁴Iqbal dan Amin Husein, hal. xi-xii.

⁵Shalāh 'Abd al-Fattāh al-Khālīdī, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*, Cet. 3 (Oman: Dār 'Ammar, 2000), hal. 44.

⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 77.

Analisis data kajian artikel ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Sayyid Quthb dan Karyanya.

Sayyid Quthb lahir pada tanggal 19 Oktober 1906 atau tahun 1326 H di daerah Maushay, Provinsi Asyūth, Negara Mesir dan meninggal di tahun 1966. Nama lengkapnya adalah Sayyid ibn Quthb ibn Ibrāhīm ibn Ḥusain al-Syazīlī. Ayah dan Ibunya adalah orang saleh dan sangat respon terhadap nilai-nilai agama. Ayahnya yaitu Haji Quthb ibn Ibrāhīm selain sebagai petani kelas menengah juga menjadi bagian anggota partai nasionalis waktu itu⁷. Keluarganya sejak awal sudah bersentuhan dengan dunia politik⁸. Pendidikan awal Sayyid Quthb adalah dari Ayahnya sendiri. Ternyata pada usia Sayyid Quthb yang kesepuluh tahun, ia sudah berhasil menghafal al-Qur'an secara keseluruhannya. Pada usianya yang mencapai 13 tahun, setelah terjadinya Revolusi Rakyat Mesir pada tahun 1919 maka Sayyid Quthb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah, tepatnya pada tahun 1920. Setelah itu ia masuk Madrasah Muallimin al-Awaliyyah di tahun 1922 dan melanjutkannya ke sekolah persiapan Dār al-'Ulūm di tahun 1925⁹. Kemudian ia meneruskan pendidikannya ke Fakultas Dār al-'Ulūm, Universitas Kairo pada Tahun 1930. Setelah itu ia menamatkan studi mahasiswanya dengan waktu yang cepat juga yaitu pada tahun 1933 dengan meraih gelar Lc¹⁰.

Setelah menyelesaikan kuliahnya Sayyid Quthb langsung diterima di Lembaga Pemerintahan waktu itu dan diangkat sebagai tenaga pengajar di Departemen Pendidikan di Madrasah al-Dawudiyah, lalu pindah ke Madrasah Dimyaṭ tahun 1835 dan ke Halwan pada tahun 1936. Tepatnya pada tahun 1940 akhirnya Sayyid Quthb menjabat sebagai pegawai di Inspektur Kementerian Pendidikan. Tepat di tahun 1948 beliau diutus oleh pemerintahan Mesir saat itu untuk memperdalam keilmuannya tentang sistem dan organisasi pendidikan ke Amerika¹¹. Tujuannya agar nilai-nilai barat dapat berpengaruh besar dalam pemikirannya, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pulang ke Mesir pada tanggal 20 Agustus 1950, Sayyid Quthb diangkat sebagai Asisten Pengawas Riset Kesenian di kantor Menteri Pendidikan dan pada tanggal 18 Oktober 1952, ia mengajukan permohonan pengunduran diri¹².

Sewaktu di Kairo, perkenalan Sayyid Quthb dengan pemikiran Barat tidak lepas dari kedekatannya dengan Abbās Mahmūd al-'Aqqād, seorang penulis Mesir terkenal dan sastrawan besar yang cenderung pada pemikiran Barat. Ia berkenalan pertama kali dengan al-'Aqqād berkat pamannya yang bernama Ahmad Husain Utsman. Pamannya yang berasal dari pihak ibu ini, juga merupakan seorang wartawan. Oleh sebab itu sangat lumrah juga kedekatan pamannya tersebut dengan Abbās Mahmūd al-'Aqqād. Kemudian melalui al-'Aqqād jugalah Sayyid Quthb dapat berkenalan dengan Partai Wafd, lalu bergabung dalam barisannya, sehingga ia pun menjadi seorang Wafdi (aktivis partai Wafd)¹³.

Pada awal karirnya di bidang sastra, Sayyid Quthb berpendapat bahwa sastra adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama, bahkan ia sempat berpandangan bahwa sastra bertentangan dengan agama. Setelah itu sekitar tahun 1939 hadirilah tulisan perdananya tentang Islam yang berjudul *Al-Taṣwir al-Fannī fi al-Qur'an*. Inilah titik awal dari perubahan pola pikirnya tentang Islam dan meninggalkan perspektif yang menginkari akan kemu'jizatan al-Qur'an .

⁷Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, hal. 204.

⁸al-Khālidi, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*, hal. 19-20.

⁹Al-Mustasyar 'Abd Allah al-'Aqil, *Mereka yang Telah Pergi Tokoh-tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih dan Fachruddin dari judul Min A'lam al-Harakah wa al-Dakwah al-Islāmiyyah al-Mu'āshirah* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003), hal. 602.

¹⁰Muhammad Ishom, "PEMIKIRAN SAYYID QUTHUB DALAM REFERENSI GERAKAN ISLAM POLITIK" 9 (2018): hal. 3.

¹¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi. 5 (Jakarta: UI-Press, 1993), hal. 148.

¹²al-'Aqil, *Mereka yang Telah Pergi Tokoh-tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih dan Fachruddin dari judul Min A'lam al-Harakah wa al-Dakwah al-Islāmiyyah al-Mu'āshirah*, hal. 602.

¹³al-Khālidi, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*, hal. 21-22.

Waktu terus berlanjut, Sayyid Quṭb semakin menikmati kajian al-Qur'an dan menularkannya kepada persoalan keadilan sosial dalam Islam sembari tidak melepaskan keahliannya di bidang sastra, kritik dan sajak. Kritikan-kritikannya terus menjurus kepada persoalan politik dan sosial serta terhadap golongan-golongan tertentu yang melakukan tindakan destruktif dan gaduh serta merusak¹⁴. Pada tahun 1946, Sayyid Quṭb mengeluarkan buku selanjutnya yang berafiliasi kepada kajian-kajian keislaman yang lebih progresif sehingga hadirlah bukunya yang berjudul *Al-'Adālah al-Ijtima'iyah fi al-Islām*. Semenjak itu Sayyid Quṭb berubah haluan menuju golongan para pemikir yang reformer dalam Islam, bahkan menjadi tokoh pelopor pemikiran Islam kontemporer yang paling menonjol. Ia menyerukan kebangkitan Islam yang bersifat kepeloporan dan menyerukan dimulainya kehidupan berdasarkan Islam. Karena itu, ia menafsirkan al-Qur'an dengan penafsiran baru di karyanya yang monumental tersebut, yaitu *Fī Zilāl al-Qur'an*. Pada kitab tersebut terlihat Sayyid Quṭb sebagai pendiri aliran baru dalam penafsiran, yaitu aliran tafsir al-*ḥarakī*. Ia menambahkan makna, pemikiran *ḥarakī* dan tarbiyah di dalam kitab tafsirnya tersebut¹⁵.

Muncul dan berseminya ketertarikannya kepada semangat dakwah Islam serta perbaikan umat, tidak lepas dari peristiwa terbunuhnya pelopor dan pendiri jama'ah Ikhwān al-Muslimīn yaitu Ḥasan al-Bannā. Suasana waktu itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap mental dan jiwa spritualnya. Pada saat Sayyid Quṭb masih di Amerika dijelaskan bahwa pengalaman pribadinya sewaktu kejadian tragedi berdarah Ḥasan al-Bannā di Mesir, orang Barat waktu itu sangat bergembira dan senang atas kematiannya. Lonceng-lonceng gereja berbunyi. Kebanyakan orang menari-nari, bernyanyi-nyanyi dan saling memberikan selamat, seketika itu ia bertanya apa yang terjadi, mereka menjawab, "Musuh paling berbahaya bagi Barat dan Amerika telah terbunuh di Mesir. Dialah Ḥasan al-Bannā, Mursyid 'Ām Ikhwān al-Muslimīn¹⁶."

Sayyid Quṭb heran, "Apakah betul Ḥasan al-Bannā sehebat itu?" Padahal, ia sendiri melihat Ḥasan al-Bannā tidak begitu hebat dan bersinar sewaktu ia berada di Mesir, sehingga setelah kejadian tersebut ia pun memutuskan untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan kelompok ini, sekembalinya ia dari Amerika Serikat. Akhirnya pada tahun 1951, Sayyid Quṭb memutuskan untuk bergabung dengan jama'ah Ikhwān al-Muslimīn. Pada masa kepemimpinan yang baru di tahun yang sama, Sayyid Quṭb dijadikan pimpinan majalah Ikhwān al-Muslimīn dan menjadi salah satu anggota Maktab Irsyad 'Ām serta diamanahi untuk menjadi ketua seksi penyebaran dakwahnya.

Pada tahun 1954, terjadi penangkapan terhadap Sayyid Quṭb dan anggota Ikhwān al-Muslimīn lainnya disebabkan oleh tuduhan dan sangkaan pembunuhan terhadap pimpinan Mesir waktu itu yang dijabat oleh Jamal 'Abd al-Nashir. Tuduhan tersebut membuat Sayyid Quṭb dengan yang lainnya dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun oleh pimpinan militer yang dipimpin waktu itu oleh Jamal Salim. Hanya sekitar 10 tahun lamanya Sayyid Quṭb akhirnya dibebaskan dengan alasan kesehatan dan permintaan dari Presiden Negara Irak waktu itu yang bernama 'Abd al-Salim 'Arif. Tidak lama kemudian setelah kebebasan Sayyid Quṭb, tidak menunggu lama ia kembali dijebloskan ke dalam penjara oleh Jamal 'Abd al-Nashir dengan tuduhan kudeta serta ingin merobohkan dan menghancurkan Negara Mesir. Akhirnya Sayyid Quṭb ditangkap lagi serta dihukum mati di tiang gantungan¹⁷. Sebagai informasi bahwa di penjara inilah Sayyid Quṭb dapat menyelesaikan dan menyempurnakan kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*¹⁸. Bagaimanapun ia dikurung di jeruji besi akan tetapi Allah SWT selalu memudahkannya dalam menyelesaikan kitab tafsir yang fenomenal tersebut.

¹⁴al-Khālidi, hal. 22.

¹⁵al-'Aqil, Mereka yang Telah Pergi Tokoh-tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih dan Fachruddin dari judul *Min A'lam al-Harakah wa al-Dakwah al-Islāmiyyah al-Mu'āsirah*, hal. 603.

¹⁶Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan dari judul *'Uzāmā' al-Islām 'Abara Arba'ah 'Asyar Qarnan min al-Zamān*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 250.

¹⁷Mursi, hal. 251.

¹⁸al-Khālidi, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*, hal. 44-46.

Metode Penafsiran Ayat-ayat Madaniyyah Tentang Dimensi Politik oleh Sayyid Qutb dalam Kitab Tafsirnya

Hubungan antara dimensi politik dan model pemerintahan yang diakomodir oleh Sayyid Qutb berdasarkan interpretasi ayat-ayat al-Qur'an, khususnya terkait ayat-ayat madaniyyah menjadi penting untuk diungkap. Alasannya, selain sebagai praktisi yang kritis dengan aktifitas politik di zamannya, Sayyid Qutb juga merupakan salah seorang tokoh pemikir yang berkecimpung di dalam aktifitas penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, secara otomatis sedikit banyaknya akan terlihat bagaimana pemikirannya seputar tafsiran ayat-ayat tentang dimensi politik dan sistem pemerintahan terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat madaniyyah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka selanjutnya dalam artikel ini akan diuraikan terkait metode Sayyid Qutb di dalam menafsirkan ayat-ayat madaniyyah terkait dimensi politik dan model pemerintahan. langkah-langkah tersebut dapat dibagi kepada beberapa komponen yaitu:

Pemaknaan Ayat Secara Linguistik.

Linguistik yang dimaksud adalah pemahaman ayat-ayat al-Qur'an terutama yang berkarakteristik madaniyyah dengan afiliasi politiknya dapat ditelisik dari segi kajian pemaknaan struktur kebahasaan. Bentuk kapabilitas keilmuannya termasuk pada ilmu bahasa, bahkan Ali al-Usiy mengatakan bahwa linguistik merupakan salah satu metode dalam penafsiran al-Qur'an¹⁹. Alasan ini memberikan konsekuensi baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa ada gesekan bagi ruang linguistik untuk membantu memahami ayat-ayat madaniyyah, terutama yang terkait dalam menanggapi perkembangan isu-isu politik terkini.

Terkhusus dengan pemahaman linguistik yang berasal dari bahasa Arab maka akan memberikan ruang yang tepat serta dapat menjadi patokan mendasar dalam menafsirkan ayat-ayat madaniyyah, apalagi jika ada hubungannya dalam menanggapi isu-isu politik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moch Syarif Hidayatullah bahwa linguistik Arab dapat diklasifikasikan kepada beberapa komponen khususnya sebagai sarana awal dalam menjelaskan isu-isu politik dengan tafsiran ayat-ayat madaniyyah. Komponen tersebut dapat diklasifikasikan kepada beberapa item penting yaitu berhubungan dengan leksikon, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik bahasa Arab²⁰. Semuanya saling memberikan kontribusi masing-masing dalam menjelaskan topik yang dibahas.

Langkah dan metode ini terlihat dari penafsiran Sayyid Qutb dari beberapa ayat yang diinterpretasikannya. Sebagai contoh adalah adanya indikator-indikator nilai dari interpretasi linguistik bagi penjelasan dalam surat al-Maidah [5] ayat 45 yang terkait dengan ruang lingkup *siyāsah syar'iyah*. Secara tegas sebagaimana yang disampaikan oleh Şalāh 'Abd al-Fattāh al-Khālidi bahwa Sayyid Qutb menggunakan perangkat bahasa (linguistik) seperti nahwu, sharaf dan balaghah sebagai faktor dan sarana penunjang dalam menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkannya, tidak dipungkiri juga dalam masalah sosial dan politik. Aspek linguistik ini bukan sebagai suatu tujuan akan tetapi hanya sebagai fasilitator saja²¹.

Pada ayat 44, 45 dan 47 di surat al-Maidah [5] tersebut terlihat Sayyid Qutb menjadikan wajah nahwu (sintaksis) dan balaghah untuk mengungkap makna ayat tersebut. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa kata *ẓālimūn* dan posisi sebagai fasik bukan berarti kondisi lain seseorang atau siapa saja dari kedudukan sebelumnya atau yang pertama sebagai yang dimaksud oleh ayat sebelumnya sebagai orang yang melakukan kekufuran, akan tetapi merupakan sebagai tambahan dari sifat lain seseorang tersebut, yang tidak mau memutuskan perkara berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Jadi orientasinya juga termasuk sebagai orang yang memiliki karakter dan sifat *ẓālim*. Hal ini akan ditujukan pada diri seseorang jika tidak mendasari sikap politiknya sesuai dengan hukum dan aturan Allah SWT. Diskursus ini sebagai faktor tambahan dari sifat dan karakter dari ayat sebelumnya dan begitu juga dengan cap fasik sebagaimana yang

¹⁹Azman Arsyad, "TEKNIK INTERPRETASI LINGUISTIK DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN" 4 (2016): hal. 167.

²⁰Moch. Syarif Hidayatullah, *Cakrawala Linguistik Arab*, edisi revisi (Jakarta: Grasindo, 2017), hal. 59-150.

²¹al-Khālidi, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*, hal. 183.

tergambar pada ayat selanjutnya. Salah satu bagian dari argumen pentingnya adalah karena hal ini dilandasi dengan keluarnya dari aturan yang baik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Karena setiap aturan Allah SWT adalah baik. Akibatnya, perbuatan tersebut sama menurut Sayyid Qutb dengan menzalimi diri sendiri²².

Penjelasan narasi beberapa ayat di atas di dasari oleh kandungan dari segi linguistik bahasa Arabnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb yaitu adanya kesatuan *musnad 'ilaih* dan *fi'il syarat* yang terdiskripsikan pada bagian ayat '*Man lam Yahkum bimā Anzalallah*'. Akhirnya jawab *syarat*-nya, baik yang ditunjukkan oleh bagian pertama, kedua dan ketiga menjadi penyempurna yang komplis bagi penjelasan-penjelasan ayat-ayat tersebut²³. Inilah yang menjadi landasan penting yang dibicarakan oleh Sayyid Qutb terkait persoalan *siyāsah syar'iyah*. Posisi *musnad ilaih*-nya yang ditunjukkan oleh ungkapan '*man*' tersebut diartikan dengan maksud siapa saja komponen orangnya dan tidak menunjukkan pembatasan-pembatasan khusus akan tetapi bermakna mutlak dan bersifat umum²⁴. Oleh sebab itu dalam pikiran Sayyid Qutb dapat dijelaskan bahwa klasifikasi dari tiga komponen dan bagian yang tergabung menjadi suatu kesatuan itu, mulai dari sifat kufur, zalim dan fasik akan tertuju kepada siapa saja orang atau golongan secara universal, tidak dibatasi oleh kriteria-kriteria tertentu, baik dari segi agama, asal, ras, kasta, bangsa, negara dan lain sebagainya, yang jelas mereka telah memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT terutama hal-hal yang terkait dengan politik.

Apa yang dituju oleh Sayyid Qutb dalam interpretasinya terhadap ayat 44,45 dan 47 dalam surat al-Maidah [5] adalah sesuatu kajian tafsir al-Qur'an yang memiliki hubungan tersendiri terhadap linguistik. Terkait ini Moch Syarif Hidayatullah mengungkapkan dengan indikator-indikator yang ada bahwa pemahaman yang disampaikan oleh Sayyid Qutb tersebut sesuai dan dapat menjadi bagian yang terhubung dengan linguistik pada tingkatan semantik. Bagian ini istilahnya disebut juga dengan *al-tagayyur al-dilālī*. Artinya adalah terjadinya pergeseran atau perubahan makna²⁵. Implikasinya adalah bagi siapa saja yang tidak mengambil hukum Allah SWT akan terklasifikasikan pada karakter yang dimiliki oleh golongan orang-orang kafir, zalim maupun fasik. Terutama bagi yang masih mengaku sebagai orang Islam, maka tergolong kepada sikap yang menjadi sifat orang kafir, zalim maupun fasik sekalipun mereka tidak keluar dari *millah* Islam.

Penjelasan ini memberikan diskripsi yang kongkrit terhadap kontribusi linguistik sebagai jalan perantara dalam mengeksplorasi secara diskursif terhadap penafsiran politik bagi ayat-ayat madaniyyah. Hal ini tergambar dari apa yang ditawarkan oleh penafsir terutama Sayid Qutb tentang relasi seputar nalar logis penafsiran ayat politik khususnya ayat madaniyyah dengan problematika linguistik.

Elaborasi Ayat dari Segi Naql dan 'Aql.

Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa berdasarkan karakter politik itu sendiri, politik dan segala yang melingkupinya akan mengalami siklus perubahan secara tidak pasti dan fluktuatif, hal ini terjadi seiring dengan bergantinya waktu dan zaman, konsekuensinya adalah pemahaman politik dari al-Qur'an tidak akan dapat mengabaikan dalil-dalil akal dan logika sekaligus tidak melupakan dan mengabaikan dalil-dalil *naql* yang benar, oleh sebab itu dengan segala karakter keluwesan syari'at itulah ia akan terus "melompat dan berkelana menyusuri setiap sudut sisi kehidupan"²⁶.

Kupasan gagasan dasar di atas telah dijiwai oleh paradigma bahwa keselarasan antara proses interpretasi *naql* dengan alur berfikir '*aql*' secara tersistem akan menjadi kekuatan argumentasi yang utuh serta komprehensif. Spirit manhaj ini agakny cocok dengan pandangan Abdul Mustaqim tentang penafsiran bercorak salafī (*ittijāh salaf*). Penafsiran ulama terdahulu yang

²²Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'an*, juz. 2 (al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2003), hal. 900.

²³al-Khālidi, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*, hal. 183-184.

²⁴ Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'an*, 2003, hal. 900.

²⁵Hidayatullah, *Cakrawala Linguistik Arab*, hal. 136-137.

²⁶Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Ḍau'i Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2011), hal. 26.

mengkombinasikan alur berfikir secara *naql* dan *'aql* atau perpaduan antara tafsir *bi al-ma'sūr* dengan *bi al-ra'y*. Kitab tafsir Sayyid Qutb termasuk dalam kategori metode ini²⁷. Implikasinya tentu berdampak pada pembacaan dan komentarnya terkait dengan ayat-ayat madaniyyah yang berbicara tentang dimensi politik dan sistem pemerintahan.

Sayyid Qutb secara optimal dan mendalam berusaha menggali dan mengemukakan makna inti serta nilai-nilai yang utama terhadap kandungan ayat tersebut dan terdeskripsikan seolah-olah ia berusaha menjelaskan metode baru yang belum pernah terjadi terhadap para mufassir terdahulu, sebagaimana yang disinyalir oleh Muhammad 'Abduh untuk menghasilkan karya tafsir tersendiri karena pembacaan tafsir ayat dan tingkat intelektual masyarakatnya yang tidak mungkin sama antara zaman terdahulu dengan sekarang²⁸. Kemudian Sayyid Qutb tidak juga memelintir *naṣ* al-Qur'an tersebut sesuai keinginan pribadi dan hawa nafsunya, akan tetapi Sayyid Qutb berusaha menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung beragam makna dan inspirasi²⁹, apalagi yang memberikan gambaran dan petunjuk tentang dimensi politik.

Deskripsi argumentasi terkait pembicaraan di atas terlihat sewaktu Sayyid Qutb mengungkap maksud dari surat al-Nisa' [4] ayat 59 yang menjadi ayat penting tentang pembahasan politik, dimana Sayyid Qutb menjelaskan bahwa aspek pokok yang terkandung di dalamnya adalah konsep ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya³⁰. Ini juga menjadi titik sentral ajaran Islam. Muara fondasinya adalah keimanan. Iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalil *naql* yang *qaṭ'i ṣubūt* maupun *dilāl*ah-nya banyak mendiskripsikannya³¹.

Lebih lanjut Sayyid Qutb mengomentari ayat di atas bahwa ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya menjadi tolok ukur utama bagi ketaatan terhadap pemimpin atau *ūli al-'amr*, karena ketaatan kepada *ūli al-'amr* bagian pengembangan atau memiliki spirit ekspansi yang mendasar dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu menurut Sayyid Qutb kriteria iman menjadi syarat wajib bagi *ūli al-'amr* tersebut. Hal ini akhirnya menjadi suatu nilai preferensi dan bahkan sampai pada taraf berstatus dogma dalam paradigma politik Islam³².

Sebuah bukti serta indikator lanjutan, bagaimana mengungkap alur politik berdasarkan keselarasan antara teknik *naql* dengan *'aql* terhadap ayat madaniyyah, dapat dikemukakan pada ayat 58 surat al-Nisa' [4]. Sayyid Qutb menjelaskan ayat ini terkait kebijakan yang mesti diambil oleh *ūli al-'amr* atau penguasa dimanapun level tingkatannya. Hasil-hasil keputusannya harus didasari oleh nilai-nilai ketaatan yang dipahami sebagai kebaikan secara kolektif atau bersifat *ma'rūf*. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh *ṣaḥīḥain* (Bukhari dan Muslim) dan lainnya, dimana singkatan matannya berbunyi *'innamā al-ṭā'ah fi al-ma'rūf*³³.

Sikap politik yang menjadi prioritas *ūli al-'amr*, tidak hanya bernilai baik secara kolektif, akan tetapi juga harus terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah SWT baik kebijakan tersebut disukai maupun tidak. Kemudian jika seorang budak diangkat secara bersama-sama menjadi pemimpin dan mengkomandoi segala kepentingannya, apabila keputusan politiknya tidak melanggar aturan syari'at dan ketentuan Allah SWT, maka wajib dipatuhi dan ditaati. Tafsiran ini menjadi ladang *naql* bagi urusan politik. Inilah yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb³⁴ dan juga penafsir yang lainnya seperti Ibn Katsīr dan lain sebagainya³⁵.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontempore* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hal. 148-149.

²⁸ M Solahudin, "PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM PENAFSIRAN ALQURAN," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (30 Desember 2016): hal. 118, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1596>.

²⁹ al-Khālidi, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*, hal. 131-132.

³⁰ Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 2003, hal. 690-691.

³¹ al-Imām Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardazbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1 (t.t: Dār al-Fikr, 2003), hal. 18.

³² Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 2003, hal. 690-691.

³³ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, Jilid. 2, juz. 5-7 (al-Qāhīrah: Dār al-Syurūq, 2003), hal. 691.

³⁴ Qutb, hal. 691.

³⁵ Imām ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Cet. 1, juz. 3 (al-Mamlakah al-'Arabīyyah al-Su'ūdīyyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1431), hal. 147-148.

Penjelasan ayat di atas merupakan tafsir *naql* yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-'Amasy³⁶, Yahyā al-Qaṭṭān³⁷ dan Umm al-Ḥuṣain³⁸ sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Quṭb. Pengambilan dari Sunnah Rasulullah SAW ini adalah suatu bentuk reaksi dari keterangan *naql* yang didiskripsikan oleh Sayyid Quṭb, sambil diikuti dengan uraian *'aql* yang bersifat diskursif.

Argumentasi dari dasar uraian *'aql* yang terukur tersebut terlihat dari penjelasan Sayyid Quṭb tentang ketaatan dan kebaikan (*al-ma'rūf*) tersebut harus seirama dengan syari'at Allah SWT, tidak melenceng dari *naṣ-naṣ* yang *qaṭ'ī*, kosong dari unsur-unsur keharaman yang dijelaskan oleh *naṣ-naṣ* dan prinsip-prinsip syari'at, kemudian Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam bagi setiap pundak individu, terkhususnya bagi yang beriman memiliki beban tanggung jawab akan suatu amanah untuk menjaga syari'at Allah SWT dan Rasul-Nya, diri dan akalunya secara optimal, sekaligus kontribusi amanah tersebut menjadikan penentu posisi mereka di dunia dan di akhirat³⁹.

Jadi posisi utama penafsiran *'aql* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quṭb, khususnya terkait dengan aspek politik adalah menjadi ranah ijtihad. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu. Dasar argumentasinya adalah bagian dari ayat 59 pada surat al-Nisa' [4] yaitu "*fain tanāza'tum fī syai' farudduh ila Allah wa Rasūl*"⁴⁰. Hal ini secara tidak langsung bagaimana Sayyid Quṭb mengedepankan penjelasan *naql* terlebih dahulu, kemudian diiringi dengan penjelasan *aql*.

Komperatif dengan Kaedah-kaedah Syari'at yang Relevan dan Tidak Menyalahinya.

Yūsuf al-Qardhāwī menyatakan sebagaimana yang dikutipnya dari Ḥasan al-Bannā bahwa seorang pemimpin dapat diikuti dari segala aspeknya apabila selama tidak berbenturan dengan kaedah-kaedah syari'at⁴¹. Sedangkan Imam al-Syāfi'ī menyatakan dengan ungkapan "*lā siyāsah illā mā wāfaqa al-syar*"⁴². Tidak ada politik kecuali mengikuti jalur dan batasan-batasan syari'at. Hal ini mengisyaratkan dan mengindikasikan bahwa kaedah-kaedah syari'at dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan dalam menjawab permasalahan yang terkait dengan ruang lingkup politik atau *siyāsah syar'iyah*. Sejalan dengan pandangan di atas, Sayyid Quṭb menjelaskan sebagaimana yang terdiskripsikan pada tafsirannya di surat al-Taubah [9] ayat 31, dimana Sayyid Quṭb memagar penjelasannya dengan kaedah. Kaedah yang diterapkan adalah seputar *ṭarīqah al-Qur'an* untuk merealisasikan kaedah tertancapnya secara kokoh unsur-unsur tauhid dalam jiwa manusia dan meniadakan seluruh aspek sebaliknya. Sayyid Quṭb memberikan konsep kaedahnya dengan istilah tidak menghalangi pernyataan umum dari Islam untuk tujuan membebaskan manusia agar menyembah Allah SWT semata dan menghindari dan meninggalkan penyembahan kepada sesama manusia⁴³.

Sayyid Quṭb secara tegas dalam konteks ayat ini merespon kaedah di atas dengan pentingnya manhaj Allah SWT dalam menghadapi metode jahiliyah dengan syarat khusus. Langkah aplikatifnya adalah dalam bentuk karakter manhaj pergerakan Islam yang seimbang dan unggul, hal ini sebagai respon terhadap realitas yang sangat komplis. Inti sari syaratnya adalah dengan merealisasikan kaedah kebebasan yang hakiki secara umum bagi Islam untuk menyampaikan nilai-nilai ketauhidan, maka terjamin seluruh hak dan kewajiban manusia yang mengomandangkan tema pembebasan dari penyembahan kepada selain Allah SWT semata.

³⁶Imām Abī 'Abd Allah Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, cet. 1 (Bairūt: Dār Ibn Katsīr, 2002), hal. 1062 dan 1765.

³⁷Imām al-Hāfiẓ ibn al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, cet. 1 (al-Riyāḍ: Dār Tayyibah, 2006), hal. 892.

³⁸Muslim, hal. 892.

³⁹Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 2003, hal. 691.

⁴⁰Quṭb, hal. 691.

⁴¹al-Qardhāwī, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Daw'i Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā*, hal. 116.

⁴²Syams al-Dīn Abī 'Abd Allah Muhammad ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Thuruq al-Hikamiyyah al-Siyāsah al-Syar'iyah*, cet. 1 (Bairūt: Al-Maktabah al-Muayyad, 1989), hal. 12.

⁴³Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, Jilid. 3, juz. 8-11, (al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2003), hal. 1621.

Sehingga konsekuensinya adalah hukum negara dan peraturannya termasuk apapun sistem masyarakat yang ada di muka Bumi ini, seyogyanya membebaskan nilai-nilai tauhid ini hadir dan bersuara untuk memberikan manfaatnya yang nyata dan tidak berusaha untuk menghalang-halangnya. Hal ini sejalan dengan kaedah umum syari'at yang berlaku yaitu "lā ikrāh fi al-dīn"⁴⁴.

Sayyid Qutb mengungkapkan dalam merespon penggunaan kaedah *taqrīr al-tauhīd* ini, ia sangat konsen mendeskripsikan pola penyelewengan ketauhidan, terutama dengan sikap, keputusan, dan tingkah laku orang yang mengikuti para *ahbār* yaitu cendikiawan *ahl al-kitāb* dan *rahib* selaku agamawan kaum Nasrani⁴⁵. Golongan ini sangat menyalahi nilai-nilai yang Allah SWT tetapkan. Kelakuannya adalah dengan membuat aturan dan keputusan serta kebijakan yang menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT kepadanya. Syari'at dan hukum-hukum Allah SWT sudah mereka selewengkan dan dirubah. Pengikut mereka dengan penuh kesadaran mengikuti tata cara yang dilakukan oleh *ahbār* dan *rahib-rahīb* tersebut meskipun mereka tidak melakukan penyembahan terhadap mereka. Tindakan selanjutnya adalah kaum cendikiawan Nasrani melegitimasi ketuhanan al-Masih ibn Maryam dengan melakukan penyembahan kepadanya. Ini merupakan preseden yang buruk dan menyalahi. Inilah juga menurut penulis bagian politik ketuhanan yang salah dan menyimpang dari petunjuk al-Qur'an.

Kedua sikap di atas adalah gambaran penyalahan serta penyelewengan terhadap ketetapan tauhid, oleh sebab itu Sayyid Qutb dalam penjelasan ayat tersebut mengklasifikasikan kedua tindakan itu sejajar dalam bingkai perbuatan syirik kepada Allah SWT. Penjelasan Sayyid Qutb ini diiringi dan didasari oleh referensi yang *ma'sūr* dari hadis Rasulullah SAW dan kesimpulan dari penjelasan ulama tafsir terdahulu⁴⁶. Hadis Rasulullah SAW tersebut selain berposisi sebagai penjelasan ayat ini, juga memungkinkan sebagai argumentasi secara historis, khususnya dalam meneropong kasus penerapan kaedah *taqrīr tauhīd* serta nilai-nilainya. Sayyid Qutb dalam hal ini mengisahkan situasi yang terjadi, dengan perpaduan sebuah penjelasan hadis dengan sejarah, dalam rangka mengambil dan memperlihatkan gambaran yang jelas terhadap keselarasan antara kaedah dengan argumentasi secara kontekstual, terhadap ayat madaniyyah ini yang bercirikan dimensi politik sebagaimana yang telah penulis narasikan sebelumnya. Deskripsi hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imām al-Tirmizī (w. 279 H) dan diberi penilaian hasan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Bānī⁴⁷ yaitu;

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَرِيدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي غُتَيْي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءةٍ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}. قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.⁴⁸

Artinya: "Menceritakan kepada kami Husain ibn Yazid al-Kufi, ia berkata: Menceritakan kepada kami 'Abd Allah al-Sallam ibn Harb dari Ghuthaif ibn 'A'yan dari Mush'ab ibn Sa'd dari 'Adi ibn Hatim, ia berkata: Saya mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan dileherku terdapat kalung salib dari perak. Maka Rasulullah SAW bersabda: Wahai 'Adi buanglah berhala itu dari dirimu dan kemudian Rasulullah SAW membacakan surat bara'ah: 'mereka menjadikan para cendikiawannya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah SWT'. Lalu 'Adi berkata: 'Adapun mereka tidak melakukan penyembahan, akan tetapi, jika mereka (pemuka ahl kitab dengan Nasrani) menetapkan perkara yang halal bagi pengikutnya, maka pengikutnya akan mamatuhinya, dan jika menetapkan sesuatu yang haram untuk mereka, maka mereka akan dengan mudah mengikutinya'".(HR. al-Tirmidzī:3095)

Hadis di atas menjadi alasan dan argumentasi Sayyid Qutb dalam menceritakan kondisi dan konteks penjelasan ayat itu yang telah penulis jelaskan sebelumnya sesuai dengan kaedah yang

⁴⁴Qutb, hal. 1620-1621.

⁴⁵Qutb, hal. 1641.

⁴⁶Qutb, hal. 1641-1643.

⁴⁷Muhammad ibn 'Isya ibn Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, juz. 4, cet. 1, (al-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, t.th), hal. 275.

⁴⁸al-Tirmizī, hal. 694.

telah digunakan, dengan mengandengkan riwayat al-Tirmizī dan al-Ṭabarī. Di sini terlihat jelas tindakan kaum yang dipimpin oleh ‘Adī ibn Ḥātim sebelum memeluk Islam, dimana Sayyid Qutb jelaskan bahwa ‘Adī ibn Ḥātim al-Ṭa’i adalah termasuk petinggi kaum Nasrani di kala itu⁴⁹. Tindakan mereka yang melakukan ritual-ritual pengibadahan dengan berpedoman kepada petuah buatan orang-orang cendikiawan dan rahib-rahib mereka, menjadi korelasi yang dapat menjelaskan penggunaan kaedah dalam menjelaskan ayat tersebut. klarifikasi perbuatan tersebut sangat jelas diungkap dalam hadis riwayat al-Ṭabarī (224-310 H)⁵⁰.

Relevansi antara Orientasi Kajian Ayat-ayat al-Qur’an Tentang Politik dengan Sentuhan Politik secara Keilmuan.

Politik sebagai bagian keilmuan yang integral hadir sebagai respon aktual terhadap praktik-praktik politik. Butuh proses yang berkelanjutan untuk mengakomodir aktifitas politik dan berbagai strateginya, apalagi ada usaha untuk menjadikannya sesuatu yang legal-formal serta mendapatkan tanggapan dari keilmuan dalam bidang politik, karena politik dengan ilmu politik sangat jauh berbeda. Persoalan ini memiliki penjelasannya tersendiri, karena antara politik dan ilmu politik berpisah dalam hakikat nilai. Artinya apapun penjelasan dari ilmu politik, maka sikap audien adalah mencerna dan memahami⁵¹, jika teraktualisasikan dalam sikap dan perilaku, maka secara spontanitas ia terhubung dengan nilai dan ukuran kebaikan, karena secara umum politik tidak lepas dari tujuan kebaikan bersama⁵². Singkatnya, ilmu politik dalam bahasa E Armada Riyanto CM sering kali bersentuhan dengan perkara ilmu pengetahuan benar atau salah dalam kebijakan publik, sedangkan politik tidak mengenal salah⁵³.

Selaras dengan paradigma di atas, maka respon politik yang terkait dengan norma inilah yang menjadi sasaran dan target dari tafsir ayat-ayat madaniyyah. Hal ini sesuai dengan kaedah tafsir sebagaimana yang diungkapkan oleh ‘Abd al-Hayy al-Farmawī bahwa tafsir berorientasikan untuk menyingkap seluruh tujuan Allah SWT dalam setiap suruhan dan larangan-Nya demi terwujudnya kehidupan yang stabil dan terkontrol dengan baik⁵⁴.

Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa gambaran hakikat dan norma-norma kebaikan dalam bingkai kebijakan, intruksi-intruksi dan perintah melakukan kebaikan serta pencegahan untuk berbuat keinkaran sarana utamanya adalah kekuasaan atau politik kepemimpinan. Sayyid Qutb telah menyatakan paradigma ini dikala menafsirkan surat Ali Imran [3] ayat 104, dimana Sayyid Qutb menyatakan bahwa menyeru dan berdakwah kepada kebaikan adalah menjadi bagian yang tidak lepas dari tugas masing-masing atau setiap individu dari segolongan umat atau jama’ah, sedangkan perintah kepada yang *ma’rūf* dan pencegahan kepada perbuatan yang ingkar adalah bagian dari tanggung jawab kekuasaan⁵⁵.

Pada penjelasan Sayyid Qutb di atas secara tersirat bahwa sudah terlihat secara konkrit penerapan dari bagian metodologi ini yaitu konsep politik secara keilmuan memiliki kesejajaran dengan orientasi yang dituju oleh al-Qur’an yaitu aplikasi kebaikan. Kemudian Sayyid Qutb di berbagai penjelasannya pada tafsirnya menyebutkannya dengan istilah manhaj Allah SWT⁵⁶. Manhaj Allah SWT menjadi landasan utama dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan terutama terkait dengan politik, sehingga memberikan efek yang baik dalam perbuatan yang berhubungan dengan setiap aktivitas politik. Baik yang tersistem dalam institusi maupun terkait dengan sebagai sosok individual yang produktif dalam kebaikan moral. Buktinya dalam

⁴⁹Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’an*, 2003, hal. 1641-1642.

⁵⁰Abī Ja’far Muhammad ibn Jarī al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayy al-Qur’an*, juz. 14, (al-Qāhirah: Maktabah ibn Taymiyyah, t.th), hal. 210.

⁵¹E. Armada Riyanto CM, *Berfilsafat Politik*, cet. 2 (Yogyakarta: Karnisius, 2015), hal. 52.

⁵²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, cet. 6 (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 19.

⁵³Riyanto CM, *Berfilsafat Politik*, hal. 52.

⁵⁴‘Abd al-Hayy al-Farmawī, *Metode Tafsir Maudhu’i Dan Cara Penerapannya*, diterjemahkan oleh Rosihon Anwar dari judul *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū’i: Dirāsah Manhajīyyah Maudhū’iyyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 17-18.

⁵⁵Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’an*, Jilid. 1, juz. 1-4, (al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2003), hal. 444.

⁵⁶Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’an*, 2003, hal. 1620.

penjelasan Sayyid Qutb selanjutnya menyatakan bahwa manhaj Allah SWT itu tidak semata-mata berbentuk nasihat, bimbingan dan keterangan saja, akan tetapi ada aspek lain yang juga dianggap sangat penting yaitu menghadirkan dan mengkondisikan kekuasaan yang memerintah dan melarang; mewujudkan yang baik (*ma'rūf*) dan meniadakan kemungkaran dari kehidupan manusia⁵⁷. Inilah bagian dari hakikat politik kekuasaan tersebut. Oleh sebab itu, menurut penulis di sinilah target yang diinginkan dan direkomendasikan. Ranah politik yang dituju oleh ayat-ayat madaniyyah memiliki dan membawa karakternya tersendiri serta mendiskripsikan konsep-konsep dasar yang fundamentalis, sebagaimana yang telah dijelaskan.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur terhadap pembahasan penelitian ilmiah ini, maka dapat disimpulkan kepada beberapa penjelasan sebagai berikut; Penjelasan terkait dimensi politik pada ayat-ayat madaniyyah, sebagaimana yang terdiskripsikan dalam acuan metodologi penafsiran pada kitab *Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Qutb menunjukkan bahwa hakikat gerak politik aplikatif yang tercakup dalam berbagai dimensinya seharusnya berdasarkan kepada pedoman paradigma nilai-nilai yang substantif dan mendasar dalam rangka memunculkan gairah dan motivasi ke arah kemajuan dan perkembangan secara humanis berdasarkan prinsip-prinsip dasar agama Islam.

Langkah operasional dari metodologi penafsiran Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur'an* terhadap ayat-ayat madaniyyah tentang dimensi politik itu terpraktekkan tidak secara komplit melainkan dalam bentuk kondisional dan berdasarkan suasana kalimat ayat. Artinya sistem atau teknik penafsirannya harus juga dilihat dari konteks aplikatif dari ayat yang bersinggungan. Jadi metodologinya bergaya tidak tetap secara menyeluruh akan tetapi fluktuatif sesuai dari struktur kalimat ayat dan konteks di dalam penerapannya. Kemudian secara substansinya adalah salah satu prinsip ayat-ayat madaniyyah tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial-politik atau dapat juga dikatakan bahwa sistem pemerintahan akan dapat dicerahkan apabila mengacu pada pancaran nilai-nilai substantif dari ayat-ayat madaniyyah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aqil, Al-Mustasyar 'Abd Allah al-. *Mereka yang Telah Pergi Tokoh-tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih dan Fachruddin dari judul *Min A'lam al-Harakah wa al-Dakwah al-Islāmiyyah al-Mu'āshirah*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003.
- Arsyad, Azman. "TEKNIK INTERPRETASI LINGUISTIK DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN" 4 (2016): 14.
- Assyaukanie, Luthfi. *Islam and the Secular State in Indonesia*. Singapura: Institute Of Southeast Asian Studies, 2009.
- Bukhārī, al-Imām Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardazbah al-. *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Juz. 1. t.t: Dār al-Fikr, 2003.
- Bukhārī, Imām Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Cet. 1. Bairūt: Dār Ibn Katsīr, 2002.
- Farmawī, 'Abd al-Hayy al-. *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, diterjemahkan oleh Rosihon Anwar dari judul *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'i: Dirāsah Manhajīyyah Maudhū'iyyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hidayatullah, Moch. Syarif. *Cakrawala Linguistik Arab*. Edisi revisi. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Iqbal, Muhammad, dan Nasution Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ishom, Muhammad. "PEMIKIRAN SAYYID QUTHUB DALAM REFERENSI GERAKAN ISLAM POLITIK" 9 (2018): 18.
- Jauziyyah, Syams al-Dīn Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Qayyim al-. *Al-Thuruq al-Hikamiyyah al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Cet. 1. Bairūt: Al-Maktabah al-Muayyad, 1989.

⁵⁷Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 2003, hal. 444.

- Katsīr, Imām ibn. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Cet. 1, juz. 3. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1431.
- Khālīdī, Shalāh 'Abd al-Fattāh al-. *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*. Cet. 3. Oman: Dār 'Ammar, 2000.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan dari judul 'Uzamā' al-Islām 'Abara Arba'ah 'Asyar Qarnan min al-Zamān. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muslim, Imām al-Hāfīz ibn al-Husain. *Shahīh Muslim*. Cet. 1. al-Riyāḍ: Dār Tayyibah, 2006.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontempore*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.
- Qarḍāwī, Yūsuf al-. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Ḍau'i Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā*. al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2011.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'an*. Juz. 2. al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2003.
- — —. *Fī Zilāl al-Qur'an*. Jilid. 2, juz. 5-7. al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2003.
- — —. *Fī Zilāl al-Qur'an*. Jilid. 3, juz. 8-11. al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2003.
- — —. *Fī Zilāl al-Qur'an*. Jilid. 1, juz. 1-4. al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2003.
- Riyanto CM, E. Armada. *Berfilsafat Politik*. Cet. 2. Yogyakarta: Karnisius, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Edisi. 5. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Solahudin, M. "PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM PENAFSIRAN ALQURAN." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (30 Desember 2016): 115-30. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1596>.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Cet. 6. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Syukron, Ahmad. *Penafsiran Politik Sayid Quthb (Studi Atas Tafsir al-Adabī al-Harakī dalam Fī Zilāl al-Qur'ān dan Respon Ulama)*. Ciputat: Cinta Buku Media, 2017.
- Ṭabarī, Abī Ja'far Muhammad ibn Jarī al-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur'an*. Juz. 14. al-Qāhirah: Maktabah ibn Taymiyyah, t.th.
- Tirmizī, Muhammad ibn 'Īsya ibn Saurah al-. *Sunan al-Tirmizī*. Juz. 4, cet. 1. al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.